

# I. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengobankan hak untuk memenuhi kebutuhan generasi mendatang. Suatu kegiatan pembangunan dinyatakan berkelanjutan apabila kegiatan tersebut layak secara sosial, lingkungan dan komersial. Suatu kegiatan pembangunan berkelanjutan harus mampu mendorong mobilitas sosial, kohesi sosial, pertumbuhan kelembagaan, dan pemerataan manfaat pembangunan agar dapat dianggap berkelanjutan secara sosial. Suatu kegiatan pembangunan berkelanjutan harus mampu melindungi daya dukung ekosistem, menjamin keanekaragaman hayati, dan melestarikan sumber daya alam agar dapat dianggap berkelanjutan secara lingkungan.

Kemampuan memenuhi target produksi dan produktivitas pangan bukan satu-satunya aspek kedaulatan pangan. Permasalahan pangan akan menjadi permasalahan krusial yang harus diatasi oleh seluruh pemimpin negara dan nasional di masa yang akan datang. Pertumbuhan penduduk yang cepat, kegagalan produksi pangan akibat konversi lahan dan dampak perubahan iklim global, serta marginalisasi kebijakan investasi pertanian merupakan tiga alasan utama yang berkontribusi terhadap kompleksitas permasalahan pangan. Ketahanan pangan, dalam hal ini menjadi salah satu pilar utama yang mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan.

Ketahanan pangan adalah kemampuan suatu rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangannya bergantung pada akses terhadap pangan yang cukup, aman, adil, murah, serta memenuhi standar kualitas dan kuantitas. Mencapai

ketahanan pangan sangat penting untuk mencapai kesejahteraan sosial. Terdapat perbedaan tingkat ketahanan pangan di setiap daerah. Perbedaan yang signifikan timbul pada kemampuan suatu daerah dalam memenuhi kebutuhan pangannya akibat ketimpangan tersebut. Ketahanan pangan lebih sulit dicapai di beberapa wilayah dibandingkan wilayah lainnya, seringkali disebabkan oleh faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan yang tidak mendukung. Daerah yang rentan terhadap kerawanan pangan tersebut disebut sebagai daerah rawan pangan.

Daerah yang rawan pangan seringkali mengalami kesulitan sehingga sulit memperoleh makanan sehat yang cukup. Kerawanan pangan di suatu daerah disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya kemiskinan, yang membuat individu sulit membeli makanan yang mereka butuhkan. Kurangnya akses terhadap air bersih, kurangnya tenaga medis profesional di suatu wilayah, buruknya kualitas infrastruktur ekonomi, dan sulitnya akses terhadap jalan dan transportasi juga menyebabkan suatu daerah menjadi rentan terhadap kerawanan pangan. Berikut merupakan Peringkat dan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Pulau Jawa Timur tahun 2023:

Tabel 1.1 Peringkat dan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten di Jawa Timur 2023

<b>Peringkat</b>	<b>Kabupaten</b>	<b>IKP</b>
1	Gresik	90,39
2	Ponorogo	87,91
3	Lamongan	87,28
4	Magetan	86,83
5	Mojokerto	86,70
6	Blitar	86,27
7	Bojonegoro	85,40
8	Madiun	85,32
9	Tulungagung	85,23
10	Ngawi	84,98
11	Banyuwangi	84,91
12	Tuban	84,41
13	Jombang	83,99

Lanjutan Tabel 1.1

<b>Peringkat</b>	<b>Kabupaten</b>	<b>IKP</b>
14	Nganjuk	83,68
15	Sidoarjo	83,51
16	Trenggalek	81,90
17	Pacitan	80,78
18	Malang	79,97
19	Pasuruan	79,87
20	Pamekasan	79,44
21	Lumajang	79,42
22	Kediri	78,22
23	Jember	77,43
24	Sampang	77,08
25	Sumenep	77,02
26	Situbondo	76,64
27	Bondowoso	75,50
28	Probolinggo	73,27
29	Bangkalan	73,23

Sumber : Badan Pangan Nasional (2023).

Kabupaten Blitar, sebagai salah satu wilayah di Provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi pertanian besar, menghadapi tantangan yang berkaitan dengan aksesibilitas, distribusi, dan kerentanan pangan. Kabupaten Blitar memiliki 22 Kecamatan dan 248 Desa dengan total penduduk 1.240.322 jiwa, dengan rincian laki-laki 624.631 jiwa dan perempuan 615.691 jiwa. Secara geografis terletak di garis khatulistiwa bagian selatan, Kabupaten Blitar merupakan wilayah Provinsi Jawa Timur yang terbentang antara 111° 40' – 112° 10' Bujur Timur dan 7° 58' – 8° 9' Lintang Selatan. Kabupaten Blitar memiliki luas wilayah 1.588,79 km<sup>2</sup> atau 158.880 Ha. Wilayah kecamatan terluas adalah 164,54 km<sup>2</sup> yang terdapat di Kecamatan Wonotirto, sedangkan kecamatan terkecil adalah 33,33 km<sup>2</sup> yang terdapat di Kecamatan Sanankulon. Kabupaten Blitar berbatasan dengan Kabupaten Kediri di sebelah utara dan timur, Kabupaten Tulungagung di sebelah barat, dan Samudera Hindia di sebelah selatan, serta Kota Blitar terletak di pusat Kabupaten Blitar.

Metode yang komprehensif diperlukan untuk mengidentifikasi sebaran wilayah rawan pangan, dan penyebab yang melatar belakangnya. Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan atau FSVA (*Food Security Vulnerability Atlas*) merupakan instrumen yang berguna untuk hal ini. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar, sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas pangan di wilayah ini, menginisiasi penyusunan Peta FSVA (*Food Security and Vulnerability Atlas*) untuk memetakan kondisi ketahanan pangan secara komprehensif.

Kondisi ketahanan pangan di berbagai tempat dapat diidentifikasi dan ditampilkan menggunakan FSVA (*Food Security and Vulnerability Atlas*). Data yang dihasilkan oleh FSVA (*Food Security and Vulnerability Atlas*) berguna tidak hanya memetakan wilayah rentan atau mengevaluasi kondisi ketersediaan pangan saat ini, namun juga untuk mengembangkan kebijakan dan inisiatif intervensi yang lebih tepat sasaran, serta digunakan untuk memperkuat ketahanan pangan di masa depan, mengurangi kerentanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Blitar. Hasilnya, FSVA (*Food Security and Vulnerability Atlas*) terbukti menjadi alat yang sangat berharga di semua tingkat pemerintahan dalam perjuangan meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi kerentanan (DKPP Kabupaten Blitar, 2023).

## **1.2. Tujuan**

1. Mengetahui indikator penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan atau *Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA) di Kabupaten Blitar.
2. Mengetahui jumlah wilayah-wilayah di Kabupaten Blitar dengan ketahanan pangan yang baik dan rentan terhadap masalah pangan.

### **1.3. Manfaat**

#### **1.3.1. Manfaat Bagi Mahasiswa**

1. Mahasiswa dapat mempelajari, memahami dan menerapkan teori-teori yang dipelajari di perkuliahan pada situasi nyata selama Kuliah Kerja Profesi (KKP) di instansi.
2. Mahasiswa dapat meningkatkan pengetahuan bagaimana proses penyusunan peta FSVA di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar.
3. Mahasiswa mampu menyampaikan data dan informasi yang dipelajari selama Kuliah Kerja Profesi (KKP) secara jelas dan informatif.

#### **1.3.2 Manfaat Bagi Instansi**

1. Instansi terkait turut berperan di dalam meningkatkan pengembangan profesionalisme dari mahasiswa perguruan tinggi.
2. Hasil yang didapatkan dapat digunakan sebagai acuan bagi instansi dalam memperbaiki kekurangan yang mungkin ada dalam instansi dan dapat membantu kelancaran aktivitas kerja dalam Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar.

#### **1.3.3 Manfaat Bagi Perguruan Tinggi**

1. Menjalin relasi baik antara Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar yang diharapkan dapat terus bekerja sama yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.
2. Pendukung dalam pembentukan lulusan yang memiliki kompetensi melalui pengalaman kerja selama Kuliah Kerja Profesi (KKP).

3. Tambahkan acuan dan referensi yang dapat dijadikan sebagai pengetahuan mengenai tulisan mahasiswa yang dapat direkomendasikan di perguruan tinggi.